

ROYALTI MINERBA JADI TUMPUAN BARU

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyatakan hilangnya penerimaan negara dari dividen BUMN sebagai konsekuensi dari pengelolaan langsung bagian laba BUMN itu oleh BPI Danantara, akan dikompensasi oleh kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara.

Surya D.A. Simanjuntak
surya.simanjuntak@bisnis.com

Pelaksana Harian Dirjen Anggaran Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, sejak penerbitan UU No. 1/2025 tentang BUMN, dividen perusahaan pelat merah tidak lagi masuk ke kas negara (bendahara umum negara), tetapi dikelola langsung oleh Danantara.

Oleh sebab itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hanya mencapai Rp10,9 triliun pada kuartal I/2025. Realisasi itu anjlok 74,6% dari pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp42,9 triliun.

Suahasil menjelaskan realisasi Rp10,9 triliun itu berasal dari pembayaran dividen interim BRI tahun buku 2024 yang dibayar pada Januari 2025. Setelahnya, tidak ada lagi dividen yang masuk kas negara.

Penurunan PNBP KND berdampak pada realisasi PNBP secara keseluruhan. PNBP pada kuartal I/2025 terrealisasi Rp115,9 triliun, merosot 26,03% dari pencapaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini menjadikan realisasi PNBP baru mencapai 22,6% dari target tahun ini.

Suahasil mengatakan Kemenkeu telah mengantisipasi hilangnya setoran dividen BUMN agar target PNBP sebesar Rp513,6 triliun dalam APBN 2025 tetap tercapai. *Pertama*, Ditjen Anggaran akan memperbaiki tata kelola layanan agar meningkatkan kepatuhan. Caranya adalah mereplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar-Kementerian/Lembaga (Simbara), termasuk untuk sektor perikanan dan kehutanan.

Kedua, peningkatan tarif royalti mineral dan batu bara seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 dan PP No. 18/2025. Kenaikan tarif royalti mineral diharapkan menambah PNBP SDA nonmigas. "Moga-moga nanti bisa meningkatkan

[PNBP] karena ada peningkatan tarif royalti di situ untuk beberapa kategori. Kami akan melakukan pemantauan secara khusus," jelas Suahasil dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (8/5).

Ketiga, optimalisasi PNBP pada Kementerian dan lembaga. Suahasil mengatakan empat kementerian/ lembaga yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup akan menambah objek layanan yang bisa menambah PNBP.

Menurut perhitungan awal, upaya tersebut dapat meningkatkan PNBP hingga Rp1 triliun—Rp2 triliun. "Ini bukan yang tiba-tiba kemudian bisa menjadi terlalu besar, tapi moga-moga bisa meningkatkan PNBP kita kedepannya," katanya.

Keempat, penguatan proses bisnis dan program kolaboratif antar lembaga lembaga di Kementerian Keuangan (*joint program*). Suahasil memberi contoh, PNBP yang merupakan kewenangan Ditjen Anggaran sangat berkait-

an dengan kegiatan ekspor yang berada di wilayah kewenangan Ditjen Bea dan Cukai.

"Kami sudah mulai melakukan koneksi ini, dan melihat kepatuhan-kepatuhan ini, dan saya rasa nanti moga-moga dalam beberapa waktu ke depan, kita sudah mulai bisa lihat,antisipasi, berapa yang kira-kira bisa kita perbaiki dari *joint program* ini," ujarnya.

REVISI UU PNBP

Pembentukan BPI Danantara yang berimplikasi pada penurunan PNBP KND membuat Komisi XI DPR menggagas revisi UU No. 9/2018 yang mengatur PNBP. Ide itu juga muncul karena Komisi XI menilai arah pengelolaan PNBP belum jelas.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mendorong agar UU PNBP segera direvisi karena dividen BUMN tidak lagi masuk ke dalam postur APBN setelah dikelola langsung oleh Danantara. Revisi UU PNBP perlu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dan muncul ketidakpastian hukum tentang status dividen BUMN.

Memang, UU PNBP menegaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN) termasuk dalam objek PNBP. Hanya saja, UU No. 1/2025 tentang BUMN menegaskan bahwa dividen perusahaan pelat merah dikelola langsung oleh BPI Danantara.

"Tentunya, [UU] PNBP-nya juga kita sesuaikan. Kami dorong untuk UU PNBP-nya juga direvisi," ujar Wihadi dalam RDP.

Revisi UU PNBP, sambungnya, juga memungkinkan perluasan objek PNBP. Dengan begitu, nilai PNBP ke depan bisa tetap meningkat meskipun



Moga-moga nanti bisa meningkatkan [PNBP] karena ada peningkatan tarif royalti di situ untuk beberapa kategori.

dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara.

Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai UU PNBP perlu direvisi. Selain karena kemunculan Danantara, dia melihat arah pengelolaan PNBP kini tidak jelas. Di satu sisi, PNBP berfungsi sebagai alat menambah penerimaan negara sehingga alam kerap 'dikorbankan' untuk mencapai tujuan itu. Di sisi lain, PNBP berfungsi untuk menyediakan pelayanan publik, mulai dari rumah sakit hingga perguruan tinggi.

"Cara kita mengelola SDA [sumber daya alam], pelayanan publik, kekayaan negara yang dipisahkan, BMN [barang milik negara] dan lainnya, itu sama, tidak dibedakan," ujar Misbakhun pada kesempatan yang sama.

Padahal, menurutnya, cara mengelola ketentuan umum PNBP SDA harus berbeda dengan mengelola PNBP dari sistem birokrasi. Oleh sebab itu, dia mendorong revisi UU PNBP agar ada pemisahan jelas arah pengelolaan PNBP. Legislator dari Fraksi Golkar itu memberi contoh Rusia yang sekitar 40% pendapatan negaranya berasal dari PNBP. Menurutnya, struktur PNBP SDA Rusia hampir sama dengan Indonesia, yaitu berasal dari mineral seperti nikel, emas, dan tembaga. Kendati demikian, nasib fiskal Rusia dengan Indonesia berbeda. APBN Indonesia kerap defisit, tetapi APBN Rusia surplus.

"Nah, saya membawa [ide] ke sini ini untuk kita berpikir ke depan bagaimana mengelola [PNBP]," katanya. Sementara itu, Suahasil menga-

takan bahwa pemerintah tidak anti dengan wacana revisi UU PNBP tersebut. Menurutnya, ide itu perlu agar fokus pengelolaan PNBP tidak seperti 'hutan rimba'.

"Saya enggak ada masalah kalau kita melakukan *overview* terhadap Undang-undang PNBP," ujar Suahasil.

Selain karena alih kelola dividen BUMN ke Danantara, kinerja PNBP belakangan juga terpengaruh oleh moderasi harga komoditas. Suahasil mengatakan dua harga komoditas yang paling berkontribusi pada perkembangan PNBP adalah minyak mentah Brent dan batu bara. Jika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) dan harga batu bara acuan (HBA) melonjak, maka PNBP akan ikut terkerek.

Masalahnya, belakangan harga Brent turun 17,5% *year-to-date* (YTD) dan 13,3% *year-on-year* (YoY) serta harga batu bara merosot 21,8% YTD dan 18,5% YoY. Akibatnya, realisasi penerimaan PNBP pada 2024 hanya Rp584,3 triliun, turun 5,6% dari dibandingkan dengan realisasi PNBP setahun sebelumnya. Bahkan, APBN 2025 juga menargetkan PNBP hanya mencapai Rp513,6 triliun pada tahun ini, turun 11,2% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp584,3 triliun.

"Nah, ini sangat memengaruhi. Begitu harga komoditas berubah, maka akan memengaruhi PNBP kita," kata Suahasil.

Kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) signifikan dalam tiga tahun terakhir, terutama bersumber dari PNBP kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dan badan layanan umum (BLU).

Meskipun demikian, moderasi harga komoditas menimbulkan tekanan pada kinerja PNBP 2024-2025.

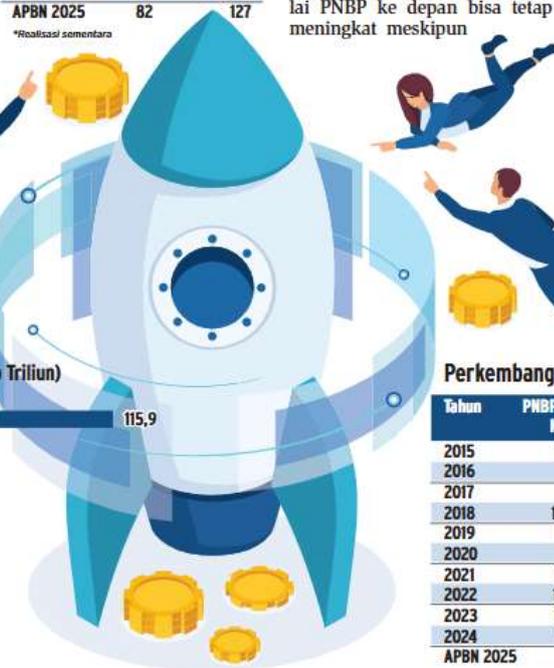


BISNIS/MIMRON GHAZALI
Sumber: Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan

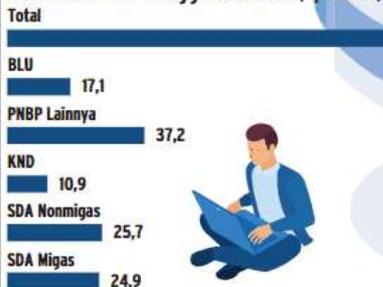
Perkembangan ICP & HBA

Tahun	ICP (US\$ Per Barrel)	HBA (US\$ Per Ton)
2015	49	60,1
2016	40	61,8
2017	51,2	85,9
2018	67,5	99
2019	62,4	77,9
2020	40,4	58,2
2021	68,5	121,5
2022	97,1	276,6
2023	78,4	201,1
2024*	78,1	121,5
APBN 2025	82	127

*Realisasi sementara



Realisasi PNBP Hingga 31 Maret (Rp Triliun)



Perkembangan PNBP (Rp Triliun)

Tahun	PNBP SDA Migas	PNBP SDA Nonmigas	PNBP KN	PNBP Lainnya	Penerimaan BLU	Total PNBP	Pertumbuhan (%)
2015	78,2	22,8	37,6	81,7	35,3	255,6	-35,9
2016	44,1	20,8	37,1	118	41,9	262	2,5
2017	81,8	29,3	43,9	108,8	47,3	311,2	18,8
2018	142,8	37,8	45,1	128,6	55,1	409,3	31,5
2019	121,1	33,8	80,7	124,5	48,9	409	-0,1
2020	69,1	28,1	66,1	111,2	69,3	343,8	-15,9
2021	96,6	52,9	30,5	152,5	126	458,5	33,4
2022	148,7	120,1	40,6	196,3	89,9	595,6	29,9
2023	116,2	138	82,1	180,4	95,8	612,5	2,8
2024	110,9	118,3	86,4	163,6	101,3	584,3	-5,6
APBN 2025	121	96,9	90	127,7	77,9	513,6	-11,2